

PELATIHAN MANAJEMEN KEUANGAN BAGI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) KERAJINAN ACEH

Hafizhah Risnafitri*¹, Rimal Mahdani², Cut Widy Aulia Putri³, Abrar Amri⁴

^{1,2,3} Program Studi Akuntansi, Universitas Teuku Umar

e-mail co Author: hafizhahrisnafitri@utu.ac.id

ABSTRAK

Potensi UMKM khususnya di bidang kerajinan Aceh hingga sejauh ini, belum cukup tergarap dengan maksimal, sebaliknya banyak pelaku kegiatan UMKM (pemilik) kerajinan justru sering mengalami masalah internal sehingga sulit untuk berkembang dan bersaing baik antara sesama UMKM maupun dengan produsen besar. Masalah manajemen keuangan merupakan salah satu masalah yang sering ditemui di dalam UMKM kerajinan Aceh. Umumnya, pelaku UMKM kerajinan Aceh memulai usaha mereka dengan bermodal nekat tanpa dibekali dengan rencana pemodalangan jangka panjang maupun kemampuan dan pengetahuan manajerial yang dibutuhkan dalam berwirausaha. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberi motivasi dan semangat kepada pelaku UMKM untuk melakukan wirausaha, meningkatkan kreativitas dan inovasi para pelaku UMKM, memberi pengetahuan, pemahaman, serta strategi pemasaran melalui e-commerce dan memberi pelatihan manajemen keuangan pelaku UMKM. Kegiatan ini dilakukan dengan memberikan pelatihan manajemen keuangan kepada masyarakat khususnya pelaku usaha kerajinan Aceh. Kegiatan akan didokumentasikan melalui video yang selanjutnya akan ditampilkan secara serentak pada kegiatan utama. Hasil dari pelaksanaan kegiatan pengabdian ini ditemuinya masalah yang ada di UMKM Kerajinan Aceh pada bidang keuangan, baik itu pada pengelolaannya yang masih tercampur akan pengelolaan keuangan keluarga serta keuangan usaha, kurangnya modal, sulitnya mendapatkan jejaring dengan pihak lembaga keuangan atau perbankan.

Kata Kunci : Manajemen Keuangan, UMKM, Usaha Kerajinan.

PENDAHULUAN

Saat ini, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Hal ini dikarenakan UMKM mampu menyerap tenaga kerja dan meningkatkan perekonomian masyarakat kecil dan menengah. Namun, peranan UMKM dalam perekonomian Indonesia tidak didukung dengan penyaluran literasi keuangan kepada pelaku UMKM, khususnya dalam penyusunan dan menghasilkan laporan keuangan UMKM. Hal ini dianggap penting karena dapat meningkatkan kinerja dan produktivitas pelaku UMKM menuju tingkat usaha yang lebih besar, untuk itu diperlukan pemberdayaan masyarakat oleh pihakpihak relevan seperti Perguruan Tinggi (akademisi) agar pelaku UMKM memahami dan dapat melakukan manajemen keuangan usaha yang baik dan benar.

Kebijakan pemberdayaan UMKM secara umum diarahkan untuk mendukung upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan, penciptaan kesempatan kerja dan peningkatan ekspor, serta revitalisasi pertanian dan perdesaan, yang menjadi prioritas pembangunan nasional. Dalam kerangka itu, pengembangan UMKM diarahkan agar memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penciptaan kesempatan kerja, peningkatan ekspor dan peningkatan daya saing, sementara itu pengembangan usaha skala mikro diarahkan untuk memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan masyarakat berpendapatan rendah, khususnya di sektor pertanian dan perdesaan.

Menurut Keppres RI No. 99 Tahun 1998, UMKM merupakan kegiatan ekonomi rakyat pada skala kecil yang perlu dilindungi dan dicegah dari persaingan yang tidak sehat. UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Berdasarkan Peraturan Undang- Undang No. 20 Tahun 2008, sesuai pengertian UMKM tersebut maka kriteria UMKM dibedakan meliputi usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Aceh, pada tahun 2019 persentase rasio kewirausahaan sebesar 3,3% atau setara 8,2juta, artinya dengan target 3,9% maka perlu 1,5 juta Penduduk yang usahanya menetap atau s.d tahun 2024 harus terdapat 9,7 juta jumlah penduduk yang usahanya menetap (catatan dengan jumlah penduduk 250jt). Sedangkan untuk persentase pertumbuhan penduduk, data BPS menyebutkan jumlah pelaku usaha non pertanian sebanyak 26,7 juta orang. Target pertumbuhan wirausaha sampai tahun 2024 adalah 4% atau kurang lebih 1 juta wirausaha baru. Target ini akan tercapai jika target Rasio Kewirausahaan Nasional 3,9% juga tercapai. Penumbuhan 1,5 juta wirausaha baru tentunya efektif dalam kurun waktu 3 tahun atau mulai tahun 2022 s.d 2024.

Meskipun jumlah pelaku UMKM cukup banyak dan memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian nasional, namun sebagian besar UMKM mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya. Secara umum, persoalan yang dihadapi oleh UMKM meliputi akses permodalan, pemasaran, manajemen usaha dan keuangan, aspek legal dan perpajakan. Pengelolaan keuangan menjadi salah satu aspek penting bagi kemajuan perusahaan khususnya UMKM. Hal ini disebabkan para pelakunya dihadapkan pada masalah SDM. Pengelolaan keuangan dapat dilakukan melalui akuntansi walaupun dalam hal ini standar yang digunakan bersifat dasar dan sederhana. Akuntansi merupakan proses sistematis untuk menghasilkan informasi keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan bagi penggunanya.

Praktek manajemen pada UMKM saat ini sebagian besar masih menerapkan pola manajemen tradisional, ini dikarenakan antara lain (Manurung, 2011) :

1. UMKM lebih banyak dikelola oleh perorangan (one man show) atau dikelola oleh satu keluarga yang berpegang teguh pada suatu tradisi pengelolaan usaha.

2. UMKM lebih banyak merupakan usaha yang sederhana dimana tidak dapat terlalu banyak bahan baku yang dibutuhkan, proses yang sederhana dan varian produksi yang tidak terlalu banyak.
3. Pola permintaan konsumen yang relatif tidak banyak berubah (oleh karena minimnya kompetensi).
4. Alat bantu proses dan produksi yang sederhana dan bukan tergolong berteknologi tinggi.

Atas dasar pertimbangan ini untuk membantu mengembangkan dan mencerdaskan masyarakat luas dalam wujud kegiatan pengabdian masyarakat. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan peran dosen Akuntansi dalam membantu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat khususnya pelaku UMKM.

METODE

Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini dilakukan pada usaha kerajinan Aceh yang berada pada beberapa daerah di Provinsi Aceh yaitu; Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie, Kabupaten Aceh Tengah dan Kota Lhokseumawe. Kegiatan ini dilakukan dengan memberikan pelatihan manajemen keuangan kepada masyarakat khususnya pelaku usaha kerajinan Aceh.

Selanjutnya pelatihan akan diberikan pada daerah masing-masing. Kegiatan akan didokumentasikan melalui video yang selanjutnya akan ditampilkan secara serentak pada kegiatan utama. Kegiatan utama dilaksanakan pada tanggal 17 September 2022 di Aula Politeknik Aceh pukul 08.30 sd selesai. Kegiatan dilaksanakan secara *hybrid* (*offline dan online*) agar dapat diikuti oleh peserta lainnya dari lain daerah (Nasional).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian Masyarakat dimulai dengan melakukan survey oleh panitia kegiatan kepada pelaku-pelaku UMKM yang layak untuk diberikan pelatihan sesuai pemikiran dasar bahwa UMKM tersebut masih aktif, memiliki spesifikasi produk kerajinan Aceh, memiliki tempat usaha serta bersedia diberikan pelatihan. Ditetapkan dari 23 Kabupaten/Kota di Aceh, sebanyak 5 Kabupaten/Kota yang dimenjadi daerah kegiatan ini yaitu Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie, Kabupaten Aceh Tengah dan Kota Lhokseumawe. Dari 5 daerah tersebut diambil 2 UMKM sebagai sampel kegiatan sehingga total pelaku UMKM kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah 10 UMKM.

Selanjutnya tim mendatangi pelaku UMKM untuk melakukan pelatihan dengan metode presentasi materi pelatihan terkait manajemen keuangan usaha. Setelah itu dilanjutkan dengan *Focus Group Discussion* (FGD) terkait masalah-masalah yang dihadapi oleh pelaku UMKM dikaitkan dengan kebutuhan pelatihan untuk menyelesaikan masalah yang ada. Ternyata masalah yang paling banyak memang masalah pada bidang keuangan, baik itu pada pengelolaannya yang masih tercampur akan pengelolaan keuangan keluarga serta keuangan usaha, kurangnya modal, sulitnya mendapatkan jejaring dengan pihak lembaga keuangan atau

perbankan. Untuk bidang pemasaran masalah yang mereka hadapi adalah masalah dari sulitnya mendapatkan tempat untuk berjualan, sulitnya memperluas pasar, ketidaktahuan untuk melakukan alat promosi dan pentingnya pengembangan produk. Selain dari itu pada bidang operasi adalah sulitnya mendapatkan supplier atau pemasok yang lokasinya dekat dengan tempat mereka berusaha serta sulitnya mendapatkan barang.

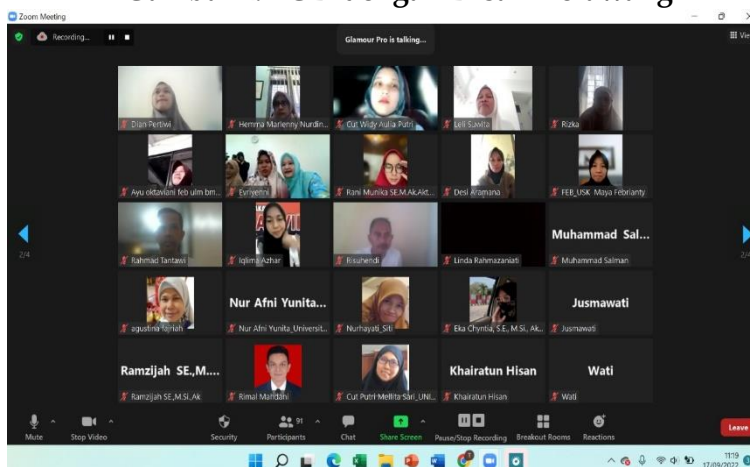
Berikut beberapa dokumentasi kegiatan pengabdian masyarakat selama pelatihan dan FGD dengan pelaku UMKM.



Gambar 1. FGD dengan Saiful Bordir (SB) Tas Bordir Aceh



Gambar 2. FGD dengan Disah Kerawang



Gambar 3. Pelatihan Menggunakan Zoom Meeting

SLIDE MATERI PELATIHAN UMKM



Gambar 4. Materi Pelatihan

KESIMPULAN

Berdasarkan kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilaksanakan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlu adanya peningkatan SDM yaitu pelaku UMKM terkait literasi keuangan serta strategi pemasaran usahanya.
2. Perlu pembinaan maupun pelatihan lebih lanjut bagi pelaku UMKM sesuai dengan permasalahan teknis yang dihadapi pelaku UMKM.
3. Perlu adanya pelatihan terkait manajemen keuangan serta pemasaran produk kearah yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Kasmir. 2010. Pengantar Manajemen Keuangan. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1998 tentang Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Bidang/Jenis Usaha Yang Dicadangkan Untuk Usaha Kecil Dan Bidang/Jenis Usaha Yang Terbuka Untuk Usaha Menengah Atau Usaha Besar Dengan Syarat Kemitraan.
- Manurung, Elvy Maria. 2011. Akuntansi Dasar Untuk Pemula. Jakarta : Erlangga
- Mulyanti, Dety. 2017. Manajemen Keuangan Perusahaan. Jurnal ilmiah Akuntansi Volume 8, Nomor 2
- Peraturan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- Soban, Dadang Husen. 2017. Manajemen Keuangan Syari'ah. Bandung: CV. Pustaka Setia.